

Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman

Dewi Amanatun Suryani¹, Hari Akbar Sugiantoro², Zahra Arwananing Tyas³

¹ Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman,

² Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman

³ Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman

Email: dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id, hariakbarsugianto@gmail.com,

zahraatyas@unisayogya.ac.id

Abstrak

Indonesia yang menganut sistem demokratis menerapkan model pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan Informasi Publik merupakan kunci bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan pembentukan PPID dan pengembangan Sistem Informasi Desa. Keberadaan Desa Girikerto yang dikenal sebagai desa budaya dan memiliki potensi sebagai desa wisata belum mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Tujuan Program Pengembangan Desa Mitra ini adalah mewujudkan Desa unggulan dan pengembangan potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan dan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berangkat dari konsep pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Action Research. Cara pendekatan ini menghasilkan rumusan bersama masyarakat dan pemerintah desa yaitu penatakelolaan informasi dan dokumentasi publik melalui kelembagaan PPID dan membangun Sistem Informasi Desa berbasis digital. Dengan terbentuknya PPID dan penyampaian informasi desa melalui website maka Desa Girikerto telah mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai UU KIP. Keterbukaan Informasi Desa merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dengan kemudahan akses berbasis digital.

Kata Kunci: Implementasi, Standar Layanan, Informasi Publik, Desa Girikerto

Pendahuluan

Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia menimbulkan konsekuensi pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi (Putra Astomo 2014). Menurut Mardiasmo (2002:20), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Demokrasi dengan demikian juga ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi juga merupakan salah satu solusi untuk menekan perilaku korup dalam penyelenggaraan negara. Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pembahasan anggaran sering menjadi ruang yang tertutup untuk diakses sehingga kemungkinan muncul manipulasi yang berujung pada tindak koruptif. Pemerintahan terbuka, transparan, dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip *open government* sangat penting untuk dijalankan di Indonesia. Dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan (Bambang Brojonegoro: 2018). Penerapan Keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan Kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalanannya. Sementara bagi masyarakat keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Dedi Mizwar: 2017). Soetrisno (1995:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1994). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan menjadi bagian dari iklim demokrasi yang berlangsung sebagaimana dikemukakan oleh Michael Saward (1994) bahwa partisipasi merupakan salah satu kondisi minimal yang harus ada dalam demokrasi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanahkan Desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa. Suryani (2019) mengemukakan bahwa implementasi Undang-Undang Desa pada kenyataannya tidak semua dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa sesungguhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dahulu banyak informasi yang dikuasai oleh desa termasuk informasi yang dikecualikan maka pada maa sekarang pengecualian tersebut bersifat ketat dan terbatas. Desa sebagai Badan Publik wajib melakukan klasifikasi informasi dan menyediakan serta memberikan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagai peraturan pelaksanaan UU KIP. Seiring perkembangan teknologi informasi, cara pandang pengelolaan informasi dan dokumentasi mengalami perubahan. Menurut Bambang Warsita (2008:135) a teknologi informasi adalah sarana dan prasarana . (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Demikian juga menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2011:57) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pemerintah Desa sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan

mengumumkan informasi publik. Sesuai prinsip mekanisme layanan informasi yang mudah, cepat, biaya ringan maka digitalisasi data menjadi sebuah kebutuhan menghadapi era revolusi 4.0

Desa Girikerto yang terletak di Kecamatan Turi Sleman merupakan salah satu desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga dalam pengelolaan dan layanan informasi publik belum berjalan optimal. Pemerintah Desa Girikerto juga belum memiliki infrastruktur Sistem Informasi Desa (SID) berbasis internet. Hambatan tersebut dikarenakan sumberdaya pengelola website tidak tersedia. Jumlah perangkat desa, kapabilitas dan fasilitas pendukung sangat terbatas. Keberadaan Kelompok Karang Taruna Girikerto “Giri Taruna Bakti” menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Desa. Harapannya, pemuda bisa berkontribusi mengoperasikan Sistem Informasi Desa yang membutuhkan pemutakhiran konten data yang banyak dan variatif. Proses pembangunan juga melibatkan kelompok perempuan dan anak. PKK Girikerto sebagai organisasi pemberdayaan perempuan memiliki kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi pada sistem informasi desa. Sehingga Kelompok PKK diharapkan juga berkontribusi dengan menunjuk kader-kader operator teknologi informasi sebagai fasilitas penunjang program kerja Kelompok PKK. Desa Girikerto sebagai desa budaya juga memiliki potensi wisata yang belum banyak dikembangkan. Dengan keberadaan Sistem informasi desa yang berbasis digital ini menjadi peluang bagi penyampaian informasi yang dapat diketahui masyarakat secara luas sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendorong masyarakat informatif yang mampu mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Metode Pelaksanaan

Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan masyarakat ini menggunakan konsep pemberdayaan. Chambers dalam Hadi (2010) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Graha: 2009). Masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian maka pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Sumodiningrat, 1999).

Dalam program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan melalui suatu pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pendekatan PRA menurut Chambers dalam

Hubertus Oja dan Hesty Tambajong (2015) adalah suatu metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Pengumpulan data dalam pengabdian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terbatas (FGD) dan pengumpulan data sekunder melalui data, dokumentasi kegiatan, maupun peraturan yang dimiliki pemerintah Desa Girikerto. Langkah pelaksanaan kegiatan secara singkat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa sosial melalui observasi dan dan wawancara tahap pertama dengan pemerintah desa dan lembaga desa (Karang Taruna dan PKK) untuk memperoleh gambaran program sesuai kebutuhan,
- b. Melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa terkait rencana program yang didanai Hibah Dikti,
- c. Melakukan sosialisasi program kerja kepada pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan PPDM di Desa Girikerto,
- d. Melakukan sosialisasi tentang UU KIP dan SID untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat,
- e. Melakukan FGD terkait kebutuhan SID dan Pengintegrasian Data dengan mengundang perangkat desa, lembaga desa (Karang Taruna, PKK, BPD, LMD) dan BUMDes.
- f. Menyusun rencana pelaksanaan program sesuai hasil FGD,
- g. Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa terkait penyusunan aturan kebijakan PPID.

Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan proses pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster (group) sehingga setiap dalam cluster tersebut akan berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya (Tahta Alfina, dkk: 2012). Kebutuhan SID masing-masing seksi/urusan dalam pemerintahan desa, lembaga, dan BUMDes ternyata bermacam-macam sehingga dibuat berdasarkan pengelompokan klasifikasi informasi dan mempertimbangkan prioritas kebutuhan. Menurut Saaty dalam Luther, (2018) proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternative. Prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian rencana PPDM dalam tahun pertama pelaksanaan. Pengklasifikasian informasi ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP Desa).

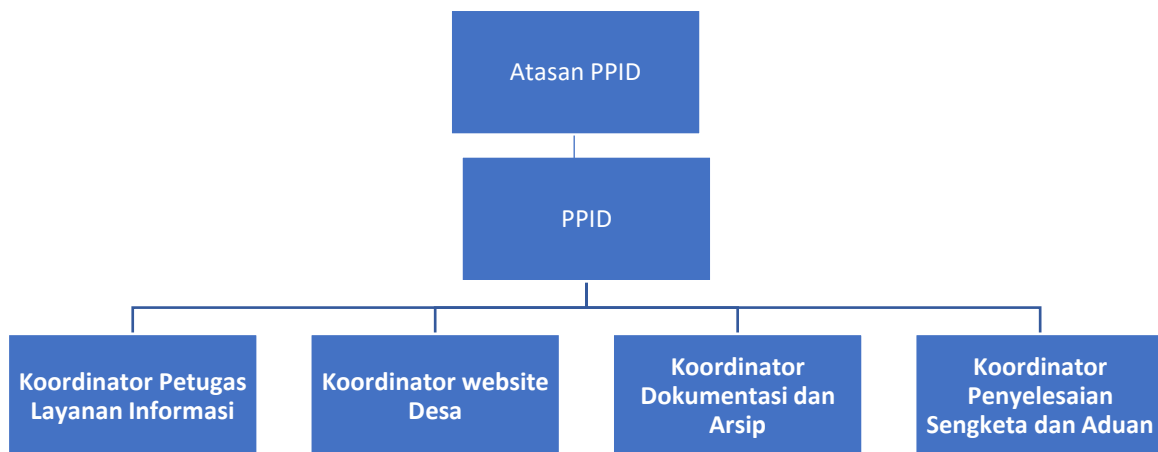
Kegiatan PPDM ini juga melibatkan Karang Taruna dan PKK yang berkepentingan dalam mengoperasikan website. Kebutuhan pelatihan bagi pelaksana PPID diinventarisir melalui pelaksanaan FGD. Berdasarkan rencana program PPDM, pelatihan yang diberikan kepada pengelola PPID antara lain tutorial penggunaan SID, pelatihan jurnalistik, dan fotografi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan PPDM yang dicapai pada tahun pertama sebagai berikut:

1. Tersedianya berbagai peraturan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas PPID yaitu : Perdes Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Keputusan Desa tentang Struktur PPID, SOP Pelayanan Informasi Publik, dan Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Publik.

Gambar 1. Bagan Struktur PPID Desa



1. Pembuatan website Desa.



Pada saat ini website desa Girikerto dalam proses penyempurnaan. Melihat berbagai website desa yang sudah ditelusuri melalui mesin pencarian, sebagai catatan layout tampilan website dibuat lebih menarik dan tidak kaku. Muatan standar informasi yang wajib tersedia pada Website Desa sebagai berikut :

Tabel 1. Muatan Informasi Website

Profil Badan Publik	Informasi tentang kedudukan atau domisili secara lengkap, Sejarah Badan Publik, Visi dan misi, Tugas dan fungsi Badan Publik, Struktur Organisasi Badan Publik, Profil singkat pejabat struktural
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	Nama program, jenis kegiatan, Nama/jabatan penanggung jawab program, Nama/jabatan pelaksana kegiatan, nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi terkait dengan program/kegiatan, Target program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, Sumber anggaran program dan kegiatan, dan Informasi tentang jumlah anggaran program dan kegiatan
Narasi ringkasan informasi	Narasi ringkasan informasi tentang realisasi kegiatan yang telah dilakukan beserta capaiannya, Narasi ringkasan informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan dan capaian pada tahun berjalan
Ringkasan laporan keuangan yang sudah di audit Tahun terakhir	Rencana realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas laporan keuangan, Daftar Barang Miliki Negara / Barang Milik Daerah
Ringkasan laporan akses Informasi Publik Tahun terakhir	Jumlah dan daftar pemohon Informasi Publik yang diterima sampai dengan akhir tahun terakhir, Informasi tentang waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik, Data tentang jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan atau ditolak serta alasannya
Informasi tentang peraturan perundangan yang terkait dengan tupoksi badan publik	Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan,
Informasi tentang Tata Cara Memperoleh dan mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, Tersedia Formulir Pengajuan Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab, Tersedia Formulir Pengajuan keberatan Informasi Publik
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik	

Sumber : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

2. Pembuatan video kegiatan PPDM

Seluruh rangkaian proses pengabdian PPDM ini didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran dalam pendokumentasian kegiatan dan pelatihan pembuatan tutorial SID. Kegiatan PPDM yang didokumentasikan antara lain dalam kegiatan sosialisasi dan FGD seperti tampak dalam gambar berikut :

Gambar 4. Foto Kegiatan Sosialisasi



Sumber : Dokumentasi PPDM

Gambar 5. Foto Kegiatan FGD



Sumber : Dokumentasi PPDM

3. Pembuatan video profil desa

Pembuatan video profil desa ini dimaksudkan untuk menginformasikan potensi desa Girikerto sebagai desa budaya dan memiliki berbagai potensi wisata seperti dusun Pancoh yang memiliki beberapa titik kawasan perairan yang bunyinya terdengar hingga mencapai radius 10 meter. Dusun Nganggring dengan Peternakan Kambing PE dan perkebunan Salak. Dusun Bening yang menawarkan ecowisata. Pembuatan video ini dilakukan oleh Karang Taruna Desa. Pelibatan Karang taruna secara aktif sekaligus mendorong partisipasi generasi muda dalam proses pembangunan. Kelompok PKK juga memiliki peran dalam pembuatan video dan pengisian materi website. Data - data program PKK banyak yang terkait dengan pelayanan

dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Informasi pelayanan dasar ini sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana program pembangunan dan evaluasinya.

Gambar 6. Proses pengambilan gambar video



Sumber: Dokumentasi PPDM

4. Pembuatan modul SID.

Sebagai bahan pembelajaran SID, kegiatan PPDM juga menyusun modul. Penggunaan modul ini ditujukan bagi PPID dalam mengelola website dan pengelolaan PPID. Materi yang dimuat di dalam modul diantaranya tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik, tata cara mengecualikan informasi, dan tutorial mengoperasikan website.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis situasi yang harus dicarikan pemecahannya, kegiatan PPDM di Desa Girikerto mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Girikerto belum mengimplementasikan UU KIP dan UU Desa dalam mengembangkan sistem informasi desa sehingga kegiatan PPDM dengan membangun infrastruktur SID melalui tata kelola PPID dan pengembangan SID dengan pembuatan website membantu penerapan keterbukaan informasi publik.
2. Informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah desa Girikerto belum diklasifikasikan sesuai standar layanan informasi publik sehingga kegiatan PPDM dalam hal penyusunan DIP dan pengklasifikasian informasi sebagai materi yang ditampilkan di website desa memberikan manfaat bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi publik.
3. Penyediaan website desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya, masyarakat dapat ikut berperan dalam proses pemutakhiran data, mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi diri, dan pengembangan desa wisata berbasis digital.

4. Penyediaan materi penunjang seperti video profil desa, video kegiatan, dan modul sangat dibutuhkan bagi pengelola PPID dalam mengoperasikan website. Materi penunjang tersebut menjawab persoalan keterbatasan SDM dan kapabilitas perangkat desa dengan mengajak Karang Taruna dan PKK berperan aktif sebagai operator website.
5. Pelibatan kelompok PKK dan Karang Taruna sebagai penggerak desa dan kolaborasi dengan pemerintah desa membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa di Girikerto dapat terlaksana dengan baik.
6. Kebutuhan akan kemudahan dalam mengakses informasi pada era Revolusi 4.0 yang muncul pada saat FGD SID merupakan tantangan yang akan dikembangkan dalam kegiatan PPDM tahun berikutnya dengan pembuatan aplikasi berbasis android untuk sector pertanian, pengembangan desa wisata, dan e-PPID.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana PPDM menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. DRPM Kemenristekdikti yang telah memberikan bantuan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui skema PPDM,
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V DIY selaku penanggungjawab kegiatan,
3. Bapak Sumaryanta, S.H selaku lurah pemerintah desa Girikerto, Sleman Yogyakarta dan segenap aparat pemerintah desa Girikerto,
4. Karang Taruna Desa Girikerto Turi Sleman,
5. Tim Penggerak PKK Desa Girikerto Turi Sleman,
6. Ibu Warsiti, M.Kep., Sp.Mat., selaku Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta,
7. Ibu Sarwinanti, M.Kep., Sp.Mat., selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta,^[1]
8. Ibu Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, ilmu sosial dan Humaniora Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Hadi, Agus Purbathin, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2010
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo*, Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pembelajaran, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011
- Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, ANDI, 2002
- Slamet, Y. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta, UNS Press, 1994
- Soetrisno*, Loekman. Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta : Kanisius, 1995

- Sumodiningrat, G. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia, 1999
- Warsita, Bambang. Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya,. Jakarta, Rineka, 2008
- Michael Saward, Democratic Theory and Indices of Democratization dalam David Beetham (editor), Defining and Measuring Democracy, London: Sage Publication Ltd, 1994
- Astomo Putra, Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI Desember, 2014
- Girsang, Luther Evi Phantias, Kajian Kriteria Penentuan Skala Prioritas Pada Proyek enanganan Jalan Nasional, Jurnal Politeknologi Vol. 17 No. 1, 2018
- Graha, A. N. Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 5 No. 2, 2009
- Hubertus Oja, Hesty Tambajong. (2015). Strategi Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) Dalam Mewujudkan Kemandirian masyarakat Transmigrasi di Kampung Marga Mulia Distrik Semangga. *Societas*, 4 (2), 114-131.
- Tahta Alfina, Budi Santosa, Ali Ridha Barakbah, Analisa Perbandingan Metode Hierarchial Clusterig. K-Means dan gabungan Keduanya dalam Cluster Data (Studi Kasus: Problem Kerja Praktek Teknik Industri ITS), Jurnal Teknis ITS Vol No 1 Tahun 2012
- Suryani Dewi Amanatun, Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa, Jurnal of Public Administration and Local Governance Vol. 3(1) Tahun 2019
- <https://www.gatra.com/detail/news/358218--Implementasi-Pemerintahan-Terbuka-dan-Transparan-untuk-Pencegahan-Korupsi> diakses 15/08/2019
- <https://jabar.tribunnews.com/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan> diakses 15/08/2019